



Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Camat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Margaretta D. Sitanggang, dan Suadi Husin*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan jumlah populasi adalah seluruh anggota kepala keluarga yang ada di Lingkungan V Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 380 kepala keluarga. Maka sampel yang diambil adalah 15% dari jumlah populasi dengan jumlah 57 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui observasi, angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik sederhana (persentase). Dari hasil penelitian pada tabel-tabel penelitian, dapat disimpulkan yakni pendapat responden terhadap pemerintah kecamatan adalah bahwa pemerintah kecamatan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya perhatian pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan meninjau dan menyelidiki secara langsung ke sekolah-sekolah penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti: tas, seragam sekolah, buku dan sepatu serta melakukan observasi terhadap kuantitas dan kualitas guru. Jadi, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Lingkungan V Kecamatan Deli Tua sudah cukup baik.

Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah; Persepsi; Pendidikan

Abstract

This research uses descriptive method with the number of the population are all members of the family head in the District V Environmental Deli old Deli Serdang regency totaling 380 households. Then the samples are taken is 15% of the total population by the number of 57 head keluarga. Teknik data collection used by the author in this study is through observations, questionnaires and interviews. Data analysis technique used in this study using simple statistics (percentages). From the results in tables of research, it can be concluded that respondents to the opinion of the district governments is that the district governments have done their job well. This is evidenced by the attention of the district governments in improving the quality of education is by reviewing and investigating directly to schools disbursement of BOS (School Operational Assistance), providing educational facilities and infrastructure such as: bags, school uniforms, books and shoes and make observations the quantity and quality of teachers. Thus, the public perception of the performance of the district governments in improving the quality of education in the District V Environment Deli Tua is good enough.

Key Words: BOS (School Operational Assistance); Perception; Education

How to Cite: Sitanggang, M.D., dan Suadi H., (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Mutu Mendidikan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 57-76

*Corresponding author:

E-mail: lubisyusniar@yahoo.com

p-ISSN: 2549 1660

PENDAHULUAN

Di era modernisasi saat ini, Semakin Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) alinea ke-2, cita-cita Negara Indonesia yang merdeka dirumuskan dengan tegas yaitu mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan kata lain disebut dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usaha dan cita-cita bangsa Indonesia telah diselenggarakan pemerintahan termasuk dalam bidang pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Untuk mewujudkan cita-cita Negara Indonesia tersebut pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan atau mendukung. Hal ini berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia harus lebih berperan aktif dalam melaksanakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi membuat dan mengawasi peraturan, tentunya harus mengetahui secara cermat peraturan dan kebijakan apa yang pantas dibuat untuk mencerdaskan bangsa. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dapat terwujud sesuai dengan keinginan dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 tentang pendidikan dasar yang menyebutkan bahwa setiap warga negara harus memiliki pendidikan dasar. Demi terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat maka pendidikan dipandang sangat perlu dan sangat penting. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah

Tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajat.

Demi terwujudnya pelaksanaan pendidikan dasar yang merata bagi bangsa Indonesia, maka pemerintah membentuk suatu program dengan menggratiskan sekolah yang berbasis pendidikan dasar. Dan sekedar mengingatkan bahwa pemerintah kita mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun *education for all, school based management* dengan disertakan motivasi pembelajaran yang menggunakan kata yang berbasis (masyarakat, internet, kurikulum, dan penilaian berbasis kelas) dan berbagai program inovasi yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan.

Akan tetapi pelaksanaan pendidikan kenyataannya belum dapat terealisasi dengan baik bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 12 menyebutkan bahwa pemerintah harus menandai bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Hal ini berarti bahwa sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan agar setiap warga negara Indonesia dapat merasakan pendidikan dasar.

Lahirnya Undang-Undang otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya dan mempunyai dampak yang besar bagi manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sumber anggaran pendidikan menjadi semakin kompleks, sistem pengalokasiannya juga melalui berbagai jalur sehingga pengelolaan penggunaannya sampai kepada tanggung jawab yang semakin kompleks pula.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 10 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang mengatur dan

menguasai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan khususnya pendidikan dasar di daerah.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin pendidikan tersebut adalah dengan di bentuknya program dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan penyimpangan seperti masih ada siswa yang orang tuanya kurang mampu, belum pernah mendapat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam pengawasan dana BOS belum seoptimal mungkin. Seharusnya pemerintah perlu mengawasi dengan benar dan ketat agar penyaluran dana BOS tersebut sampai kepada orang-orang atau pihak yang benar-benar membutuhkannya.

Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya pendidikan merupakan aset jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat satu atau dua tahun berkaitan dengan biaya (*cost*) pendidikan.

Menurut Suryadi dalam Hasbullah (2006: 27) berpendapat bahwa terdapat empat agenda dalam pendidikan yang harus mendapat perhatian serius yaitu: Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan; Aspek keadilan dalam alokasi pendidikan; Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran dan Anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan.

Karena itu tugas pemerintah bukan hanya bisa mengukur kualitas semata namun harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan (pasal 31 UUD 1945) dan dalam pembukaan UUD 1945.

Masalah yang sangat penting adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan, bagaimana kita dapat meningkatkan mutu

pendidikan mencapai standart nilai tinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Sementara fasilitas sarana dan prasarana pendidikan tidak tersedia dengan baik, hal ini merupakan suatu tindak keseriusan Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pendidikan telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan semua pihak (kepala sekolah, guru, siswa, dan orang lain sebagainya) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang harus memperhatikan segala hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Satu perhatian Pemerintah Kecamatan dalam kesejahteraan masyarakat yakni dengan adanya tindakan yang tegas dari Pemerintah Kecamatan terhadap mutu pendidikan khususnya dalam hal menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi mereka yang membutuhkannya sehingga terciptanya pembelajaran yang baik.

Selain Pemerintah Kecamatan yang berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, sosok seorang Guru sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut. Dalam hal ini diharapkan Guru yang profesional artinya bahwa Guru tersebut terlatih dalam hal mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan dapat dikatakan bahwa Guru yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula.

Dalam hal peningkatan mutu pendidikan, kita juga harus memperhatikan nasib seorang Guru, bagaimana seorang Guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sementara kehidupan/gaji yang diperolehnya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang setiap saat menuntut lebih dari apa yang dibutuhkan keluarganya.

Pada saat sekarang ini masih banyak kita lihat bahwa masih ada Guru yang

memiliki pekerjaan sampingan seperti berwirausaha untuk dapat menutupi kekurangan yang dirasakan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus memberikan perhatian atas kesejahteraan Guru sehingga dengan adanya kehidupan yang layak bagi seorang Guru maka akan mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Dan kita lihat dengan jelas bahwa masih ada Guru yang selalu mengeluh terhadap upaya pembinaan Guru serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal ini terlihat bahwa guru untuk pengurusan kenaikan pangkat harus membayar sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja sangat sulit. Oleh karena itu, Guru sangat mengharapkan perubahan terhadap kehidupannya tentunya sesuai dengan tugas yang perubahan terhadap kehidupannya tentunya sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Jadi dalam hal ini diharapkan agar Pemerintah memberikan bantuan/sumbangan terhadap nasib Guru yang sangat mengharukan tersebut agar dapat hidup dengan layak.

Adapun keterkaitan Pemerintah Kecamatan dengan pendidikan adalah bahwa Pemerintah Kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan tersebut termasuk dalam peningkatan mutu pendidikan itu sendiri dimana pemerintah kecamatan terjun langsung ke Sekolah-sekolah untuk meninjau, memantau penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kemudian, Pemerintah Kecamatan juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Deli Tua Berbatasan dengan: Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patumbak; Sebelah utara berbatasan dengan Medan Johor Kodya Medan; Sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Namorambe; Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Biru biru

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepala keluarga di lingkungan V kecamatan deli tua yang berjumlah 380 kepala keluarga. Dari jumlah populasi di atas, maka diambil sampel dengan cara random sampling (acak sederhana) adalah sebanyak 57 Kepala Keluarga.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi dilakukan untuk mengungkapkan berbagai kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Yang menjadi observasi dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan, jumlah anak-anak yang bersekolah dan tidak bersekolah, dan fasilitas yang tersedia di sekolah; Angket adalah merupakan daftar pertanyaan tertulis yang disebarakan kepada responden yang terpilih, berikan pernyataan-pernyataan yang telah diberikan alternatif atau pilihan jawaban terhadap soal-soal yang di pertanyakan; Wawancara Yang menjadi objek wawancara yaitu kepala keluarga dan kepala Camat Deli Tua.

Teknik analisa data yang di gunakan berhubungan dengan statistik sederhana karena penelitian ini hanya bersifat kualitatif yakni menjabarkan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian dan di barengi dengan penganalisaan data statistik dengan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:
P = Persentase pertanyaan yang dijawab
f = Frekuensi Jawaban yang diberikan
N=Jumlah responden yang menjawab sample
% = Persentase jawaban

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil tabulasi angket dapat dilihat pada tabel-tabel frekuensi yang terdapat di bawah ini :

Tabel I Pemahaman Responden Tentang Perhatian Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Baik | 38 | 66,67 % | N = 57 |
| Kurang Baik | 17 | 28,83 % | |
| Tidak Baik | 2 | 3,51 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai perhatian pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dapat dilihat bahwa 57 responden yang diteliti, 38 orang (66,67%) yang menjawab baik, 17 orang (29,83%) yang menjawab kurang baik, dan 2 orang (3,51%) yang menjawab tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 38 responden menyatakan baik karena memang pemerintah kecamatan memberikan perhatian terhadap pendidikan. Hal ini terbukti dengan pemerintah memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada siswa yang kurang mampu. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut tidak hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang dimiliki oleh pemerintah atau dengan kata lain sekolah negeri, tetapi juga diberikan kepada pihak sekolah swasta yang bertujuan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.

Kemudian 17 responden menyatakan kurang baik, karena mereka belum mengetahui penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang direalisasikan oleh pemerintah dan masyarakat pun masih banyak menuntut kepada pemerintah agar biaya pendidikan tidak mahal. Sedangkan 2 responden tersebut menyatakan tidak baik, karena

memang tidak ada masyarakat yang merasakan adanya penyalurannya dan tidak mengetahui bahwa pemerintah menyelenggarakan program dana BOS tersebut (Bantuan Operasional Sekolah)

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat mengetahui penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dimana hal tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga dalam hal ini pemerintah sudah memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu.

Tabel II Pemerintah Kecamatan sudah melaksanakan tugas dengan baik dalam meningkatkan mutu pendidikan

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 32 | 56,14 % | N = 57 |
| Kurang | 23 | 40,35 % | |
| Tidak | 2 | 3,51 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai Pemerintah Kecamatan sudah melaksanakan tugas baik di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat dari 57 responden yang diteliti, 32 orang (56,14%) menjawab ya, 23 orang (40,35 %) menjawab kurang, dan 2 orang (3,51%) yang menjawab tidak.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yaitu 32 responden menjawab ya menyatakan bahwa Pemerintah Kecamatan sudah melaksanakan tugas dengan baik melalui penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dengan adanya dana tersebut, maka biaya pendidikan lebih ringan dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat bersekolah dengan baik.

Kemudian 23 responden yang menjawab kurang, menyatakan hal itu dikarenakan bahwa masyarakat kurang mengetahui adanya penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah, sehingga banyak diantara masyarakat beranggapan bahwa pemerintah belum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kemudian 2 responden yang menjawab tidak baik menyatakan hal itu dikarenakan mereka tidak mengetahui pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan tidak terjun ke lapangan untuk meninjau, menyelidiki penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sehingga Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah kecamatan belum dapat memberikan suatu perubahan termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, masyarakat ini disebut masyarakat yang mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dengan dinas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih banyak dari masyarakat yang mengetahui bahwa Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam meningkatkan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik lagi tentunya dengan adanya tindakan yang nyata dari pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam pembangunan pendidikan.

Tabel III. Tanggapan responden tentang Anak-anak memiliki Minat yang tinggi untuk bersekolah

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 40 | 70,18 % | N = 57 |
| Kurang | 16 | 28,07 % | |
| Tidak ada | 1 | 1,75 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel diatas mengenai anak-anak memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah, dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 40 orang (70,18%) yang menjawab ya, 16 orang (28,07%) yang menjawab kurang, dan 1 orang (1,75%) yang menjawab tidak. Hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 40 responden yang menjawab ya menyatakan bahwa masyarakat yang berada di Lingkungan V Kecamatan Deli Tua

Kabupaten Deli Serdang memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah. Hal ini tentunya sangat didukung oleh Orang Tua yang bekerja keras untuk dapat membiayai sekolah anak-anak mereka dan anak-anak tersebut mampu mengikuti pelajaran, walaupun hidup dalam keluarga yang kurang mampu.

Kemudian 16 responden yang menjawab kurang, menyatakan bahwa masyarakat kurang banyak mengetahui anak-anak yang berada di Kecamatan Deli Tua ini memiliki minat/ bakat yang sangat tinggi untuk bersekolah dan mereka sebenarnya memiliki cita-cita yang sangat tinggi pula. Sedangkan 1 responden yang menjawab tidak menyatakan karena responden memang tidak mengetahui bahwa anak-anak di Kecamatan Deli Tua memiliki minat yang sangat tinggi untuk bersekolah/mengancam pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tidak ada di masyarakat yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Namun anak-anak yang ada di Kecamatan Deli Tua lebih banyak yang memiliki suatu prestasi yang dapat diraih dengan semangat belajar yang tinggi. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat mengetahui bahwa di Kecamatan Deli Tua ini adanya anak-anak yang memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah, menggapai cita-cita yang mereka inginkan sehingga masyarakat juga bangga terhadap anak-anak tersebut karena prestasi yang diraih oleh anak-anak tersebut.

Tabel IV Tanggapan responden tentang minat dalam menyekolahkan anaknya meningkat

| Alternatif Jawaban | Frekuensi | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|-----------|-------------------|------------|
| Ya | 35 | 61,40 % | N = 57 |
| Kurang | 20 | 35,09 % | |
| Tidak | 2 | 3,51 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai minat dalam menyekolahkan anak-anaknya dari tahun ke tahun meningkat. Dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 35 orang (61,40%) yang menjawab ya, 20 orang (35,09%) yang

menjawab kurang, dan 2 orang (3,51%) yang menjawab tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 35 responden yang menjawab ya menyatakan bahwa responden melihat adanya minat dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan banyak hal yang dilakukan oleh para orang tua untuk menyekolahkan anaknya, salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan ulet bekerja keras untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Kemudian dalam hal ini responden juga banyak mengetahui bahwa di Kecamatan Deli Tua ini adanya minat para orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya dari tahun ke tahun disebabkan oleh tinggi pula pendidikan orang tua mereka. Dengan demikian, para orang tua juga ingin anaknya lebih tinggi pula sekolahnya dari mereka sehingga anak-anak tersebut memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka. Kemudian pandangan responden bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada anaknya sehingga si anak dapat merasakan kasih sayang dari orang tua. Dan hal ini juga harus di dukung oleh mata pencaharian dari orang tua sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

Kemudian responden yang menjawab kurang menyatakan bahwa responden melihat kurangnya diantara masyarakat yang memiliki minat untuk menyekolahkan anaknya sehingga dari tahun ke tahun semakin berkurang bidang pendidikan. Selanjutnya, apabila dilihat dari peningkatan minat para orang tuanya untuk menyekolahkan anak-anaknya sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab dari adanya suatu peningkatan minat para orang tua adalah tersedianya dana untuk menyekolahkan anak-anaknya tersebut. Sedangkan 2 responden yang menjawab tidak, menyatakan bahwa memang tidak ada terlihat minat dari para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya

sehingga dari tahun ke tahun terjadi penurunan prestasi yang akan dicapai siswa tersebut. Namun, setiap siswa merasa bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan sekolahnya.

Jadi, dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya minat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak akan lebih baik dalam belajar dan melanjutkan sekolahnya dengan baik. Sehingga dengan demikian, anak-anak dapat merasakan adanya sesuatu yang dapat menjadi motivasi (dukungan) dari orang tua.

Tabel V. Tanggapan responden tentang pemerintah kecamatan pernah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 31 | 54,39 % | N = 57 |
| Kurang | 19 | 33,33 % | |
| Tidak Baik | 7 | 12,28 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai pemerintah kecamatan pernah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar. Dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 31 orang (54,39%) yang menjawab ya, 19 orang (33,33%) yang menjawab kurang, dan 7 orang (12,28%) yang menjawab tidak.

Selanjutnya hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 31 responden yang menjawab ya menyatakan bahwa responden melihat pemerintah kecamatan pernah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar. Hal ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk dapat mencerdaskan kehidupan anak-anak terutama anak-anak yang kurang mampu. Namun hal ini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk melihat perkembangan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu.

Kemudian 19 responden yang menjawab kurang menyatakan bahwa memang masyarakat kurangnya

merasakan bahwa pemerintah kecamatan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar. Dan 7 responden yang menjawab tidak, menyatakan bahwa pemerintah kecamatan tidak pernah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar.

Tabel VI. Tanggapan responden tentang Pemerintah Kecamatan dalam menumbuhkan minat bersekolah

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Ket |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| Baik | 30 | 52,63 % | N = 57 |
| Cukup Baik | 24 | 42,11 % | |
| Tidak Baik | 3 | 5,26 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai pemerintah kecamatan dalam menumbuhkan minat bersekolah, dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 30 orang (52,63%) yang menjawab baik, 24 orang (42,11%) yang menjawab cukup baik, dan 3 orang (5,26%) yang menjawab tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 30 responden yang menjawab baik menyatakan bahwa responden merasakan pemerintah dapat menumbuhkan minat bersekolah bagi anak-anak di usia sekolah. Kemudian 24 responden yang menjawab cukup baik menyatakan bahwa memang sedikit dari masyarakat yang merasakan bahwa pemerintah kecamatan dapat menumbuhkan minat bagi anak-anak untuk bersekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat mengetahui program-program yang dibuat oleh pemerintah kecamatan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kemudian 3 responden yang menjawab tidak baik, menyatakan bahwa responden memang tidak ada mengetahui bahwa pemerintah kecamatan untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Jadi, dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara masyarakat

sudah banyak mengetahui adanya program-program dari pemerintah kecamatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dan cara yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk menumbuhkan minat bersekolah yaitu memberikan arahan dan masukan yang mendukung pihak sekolah untuk melakukan hal-hal positif, seperti misalnya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pemerintah kecamatan juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap bidang pendidikan, sehingga setiap anak-anak memiliki minat yang sangat besar untuk bersekolah dan berprestasi serta meraih cita-cita yang mereka inginkan.

Tabel VII Tanggapan Responden Tentang Mutu Pendidikan Dasar Di Kecamatan Deli Tua

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Ket |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| Baik | 45 | 78,95 % | N = 57 |
| Kurang Baik | 11 | 19,30 % | |
| Tidak Baik | 1 | 1,75 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel diatas mengenai Mutu Pendidikan Dasar dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 45 orang (78,95%) yang menjawab baik, 11 orang (19,30%) yang menjawab kurang baik, dan 1 orang (1,75%) yang menjawab tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 45 responden yang menjawab baik menyatakan bahwa responden melihat dalam bidang pendidikan dasar memiliki mutu yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam bidang pendidikan. Selain itu, guru/ tenaga pendidik juga merupakan seseorang yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian, masyarakat melihat bahwa mutu pendidikan dasar di kecamatan deli tua sudah baik. Kemudian 11 responden menyatakan kurang baik

dikarenakan masyarakat hanya melihat bahwa pemerintah kecamatan itu lebih fokus terhadap bidang ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya, responden juga kurang memperhatikan mutu pendidikan sehingga masyarakat tersebut menganggap bahwa pemerintah kecamatan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemudian 1 responden yang menjawab kurang baik menyatakan bahwa responden tersebut tidak melihat adanya program-program dari pemerintah kecamatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Kemudian responden juga tidak merasakan pendidikan dasar, sehingga ada anggapan bahwa pemerintah kecamatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan responden tidak mengetahui program-program yang dibuat pemerintah kecamatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Tabel VIII. Tanggapan responden tentang anak-anak usia sekolah menikmati pendidikan dasar

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Ket |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| Ya | 31 | 54,39 % | N = 57 |
| kurang | 25 | 43,86 % | |
| Tidak baik | 1 | 1,75 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai anak-anak usia sekolah menikmati pendidikan dasar, dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 31 orang (54,39%) yang menjawab ya, 25 orang (43,86%) yang menjawab kurang, dan 1 orang (1,75%) yang menjawab tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 31 responden yang menjawab ya menyatakan responden belum mengetahui bahwa anak-anak usia sekolah menikmati pendidikan dasar. Hal ini merupakan adanya keinginan kuat dari anak-anak untuk bersekolah. Dengan demikian anak-anak tersebut merasa untuk tertarik dan memiliki tanggung jawab kepada orang tua mereka. Kemudian 25 responden menyatakan kurang dikarenakan responden kurang

mengetahui bahwa anak-anak usia sekolah kurang menikmati pendidikan dasar.

Hal ini disebabkan oleh ketidakpedulian repoden untuk mengetahui keadaan/ situasi perkembangan anak-anak usia sekolah sehingga menyebabkan suatu kekeliruaan diantara masyarakat dengan anak-anak usia sekolah.

Kemudian 1 responden yang menjawab kurang menyatakan bahwa responden tersebut tidak pernah mengetahui tentang anak-anak usia sekolah menikmati pendidikan dasar. Dan responden juga tidak pernah melihat adanya suatu keinginan dari anak-anak.

Jadi, dengan demikian dapat diketahui bahwa anak-anak usia sekolah menikmati pendidikan dasar.

Hal ini dikarenakan, pemerintah kecamatan memberikan perhatian terhadap kemajuan dalam bidang pendidikan dasar dan anak-anak usia sekolah dapat menikmati pendidikan sekolah karena adanya bantuan dari pemerintah dalam meringankan beban orang tua mereka untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi

Tabel IX Tanggapan responden tentang perhatian pemerintahkecamatan terhadap pendidikan dasar

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Baik | 34 | 59,65% | N = 57 |
| Cukup | 18 | 31,58 % | |
| Kurang | 5 | 8,77 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel diatas mengenai perhatian pemerintah kecamatan terhadap pendidikan dasar dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 34 orang (59,65%) yang menjawab baik, 18 orang (31,58%) yang menjawab cukup, dan 5 orang (8,7%) yang menjawab kurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 34 responden yang menjawab baik menyatakan bahwa responden melihat adanya perhatian dari pemerintah kecamatan terhadap pendidikan dasar, dimana hal ini

memberikan suatu dukungan kepada masyarakat untuk dapat menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Kemudian 18 responden yang menjawab cukup menyatakan bahwa pemerintah kecamatan cukup baik memperhatikan pendidikan dasar bagi masyarakat sehingga hal tersebut merupakan suatu tindakan yang nyata. Namun pemerintah kecamatan cukup membantu masyarakat dengan menyekolahkan anak-anaknya sehingga anak-anak dapat menjadi seseorang yang berhasil seperti yang mereka harapkan. Kemudian 5 responden yang menjawab kurang, menyatakan bahwa tidak mengetahui pemerintah kecamatan telah memberikan perhatian terhadap pendidikan dasar. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah kecamatan terhadap pendidikan membawa keberhasilan bagi anak-anak didik untuk lebih maju, giat lagi dalam menyelesaikan sekolahnya karena dengan mereka bersekolah sampai ke tingkat tinggi, maka dapat dikatakan wilayah/daerah tersebut telah berhasil dalam menumbuhkan semangat bagi anak didik.

Tabel X. Tanggapan responden tentang sarana dan prasarana di Kecamatan Deli Tua

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Baik | 14 | 24,56 % | N = 57 |
| Cukup | 19 | 33,33 % | |
| Kurang | 24 | 42,11 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Deli Tua dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 14 orang (24,56%) yang menjawab baik, 19 orang (31,58%) yang menjawab cukup, dan 24 orang (8,7%) yang menjawab kurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 14 responden yang menjawab baik menyatakan bahwa responden memang merasakan bahwa sarana dan prasarana sangat memadai. Namun dalam hal ini, pemerintah belum

dapat mewujudkan untuk sarana dan prasarana yang membuat masyarakat merasakannya.

Oleh karena itu, pemerintah kecamatan memiliki kebijakan untuk dapat menangani masalah sarana dan prasarana. Sebanyak 19 responden yang menjawab cukup menyatakan bahwa responden cukup merasakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak ada tanggapan mereka terhadap pemerintah. Kemudian 24 responden menyatakan kurang dikarenakan responden memang tidak pernah merasakan sarana dan prasarana yang memadai. Namun hal tersebut merupakan salah satu upaya bagi pemerintah kecamatan untuk berusaha menangani masalah sarana dan prasarana.

Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat kurang merasakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi dari sarana dan prasarana tersebut ialah untuk membantu meringankan beban. Namun sarana dan prasarana ini sangat sulit untuk diperoleh masyarakat karena jumlahnya yang sangat minim, sehingga banyak diantara masyarakat yang tidak merasakan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah kecamatan harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang sudah memadai dapat dinikmati oleh setiap orang. Hal ini yang dapat dikatakan dalam sarana dan prasarana adalah sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa sarana dan prasarana ini sangat bagi kehidupan mereka.

Tabel XI Tanggapan responden tentang pemerintah kecamatan memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Deli Tua

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 18 | 31,58 % | N = 57 |
| Cukup | 20 | 35,09 % | |
| Kurang | 19 | 33,33 % | |

| | | | |
|--------|----|-------|--|
| Jumlah | 57 | 100 % | |
|--------|----|-------|--|

Berdasarkan tabel di atas mengenai Pemerintah Kecamatan memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 18 orang (31,58%) yang menjawab ya, 20 orang (35,09%) yang menjawab cukup, dan 19 orang (33,33%) yang menjawab kurang.

Hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 18 responden menjawab ya menyatakan bahwa responden melihat bahwa pemerintah kecamatan memperhatikan sarana dan prasarana untuk kemajuan daerah yang merupakan tempat dimana masyarakatnya dapat berkembang dan tumbuh. Sebanyak 20 responden yang menjawab cukup menyatakan bahwa responden memang mengetahui bahwa sarana dan prasarana cukup diperhatikan oleh pemerintah kecamatan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan sarana dan prasarana tersebut.

Selanjutnya 19 responden yang menjawab kurang menyatakan bahwa responden melihat pemerintah kecamatan kurang dalam memperhatikan sarana dan prasarana. Hal ini merupakan suatu anggapan bahwa pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerintah kecamatan sudah cukup memperhatikan sarana dan prasarana, sehingga masyarakat memberikan suatu nilai yang positif terhadap pemerintah kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diprogramkan.

Tabel XII Tanggapan responden tentang keikutsertaan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Deli Tua

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 12 | 21,05 % | N = 57 |
| Kurang | 27 | 47,37 % | |
| Tidak | 18 | 31,8 % | |
| Jumlah | 57 | 100% | |

Berdasarkan tabel diatas mengenai Pemerintah Kecamatan memperhatikan

sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 12 orang (31,58%) yang menjawab ya, 27 orang (35,09%) yang menjawab kurang, dan 18 orang (33,33%) yang menjawab tidak.

Hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 12 responden yang menjawab ya menyatakan bahwa selama ini masyarakat ikut serta mensukseskan program pemerintah yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar segala kerusakan yang dialami oleh masyarakat, sehingga pemerintah dengan masyarakat harus bekerja sama untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selanjutnya 27 responden yang menjawab kurang menyatakan bahwa responden melihat memang masyarakat kurang memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga anak-anak mereka tidak dapat merasakan bahwa pendidikan itu sebenarnya membutuhkan perlengkapan sekolah yang betul-betul memadai bagi anak-anak tersebut.

Sejumlah 18 responden yang menjawab tidak menyatakan bahwa memang masyarakat tidak pernah ikut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak-anaknya, bahkan masyarakat juga tidak begitu peduli dalam menyediakan sarana dan prasarana tersebut disebabkan oleh keterbatasan yaitu tidak ada biaya untuk menyediakannya sehingga anak-anak mereka hanya menerima keadaan dari orang tua mereka. Hal ini berarti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu cara untuk dapat membangkitkan semangat bagi anak-anak mereka dalam menyelesaikan pendidikan. Kemudian masyarakat juga harus benar-benar memberikan tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka tidak patah semangat untuk menyelesaikan sekolahnya.

Pemerintah kecamatan juga harus mengawasi sarana dan prasarana

pendidikan, karena hal ini merupakan dukungan dari pemerintah untuk melancarkan segala yang berkaitan dengan sekolah. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan dan masyarakat diharapkan saling bekerja sama dalam mnegevaluasi tentang sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel XIII. Tanggapan Responden Tentang sarana dan prasarana pendidikan yang dibiayai Pemerintah Kecamatan

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 25 | 43,86 % | N = 57 |
| kurang | 17 | 29,82 % | |
| Tidak | 15 | 26,32 5 | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel diatas mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang dibiayai Pemerintah Kecamatan dapat dilihat bahwa dari 57 responden yang diteliti, 25 orang (43,86%) yang menjawab ya, 17 orang (29,82%) yang menjawab kurang, dan 15 orang (33,33%) yang menjawab tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 25 responden yang menjawab ya menyatakan bahwa responden melihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan memang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah kecamatan. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan subsidi dan untuk mesejahterakan masyarakatnya.

Kemudian 17 responden yang menjawab kurang menyatakan bahwa responden kurang mengetahui bahwa sarana dan prasarana dibiayai oleh pemerintah kecamatan, sehingga ada anggapan bahwa sarana dan prasarana pendidikan ditanggung oleh pihak sekolah. Kemudian 15 responden yang menjawab tidak menyatakan bahwa responden memang tidak mengetahui bahwa pemerintah kecamatan yang membiayai segala sarana dan prasarana pendidikan.

Sarana prasarana pendidikan dibiayai pemerintah kecamatan untuk mensukseskan pendidikan. Namun dalam

hal ini, pemerintah harus lebih memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya agar masyarakat tidak selalu menyalahkan pemerintah dengan menganggap pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan pendidikan. Kemudian menjadi suatu hal yang tidak boleh diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Hal ini harus benar-benar ditangani oleh pemerintah. Maka tindakan dari pemerintah tersebut sudah tepat dan harus lebih ditingkatkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berupa segala fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar siswa seperti: tas, seragam sekolah, buku, dan sepatu.

Tabel XIV. Tanggapan responden tentang kuantitas guru dalam meningkatkan Mutu pendidikan di Kecamatan Deli Tua

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Baik | 32 | 56,14 % | N = 57 |
| Cukup | 20 | 35,09 % | |
| Kurang | 5 | 8,77 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai kuantitas mutu guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, dapat dilihat dari 57 responden yang diteliti, 32 orang (56,14%) menjawab baik, 20 orang (35,09%) menjawab cukup, dan 5 orang (8,77%) yang menjawab kurang.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yaitu 32 responden menjawab baik menyatakan bahwa responden melihat kuantitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan selama ini seimbang dengan kualitas guru-guru yang ada, sehingga terjadinya proses belajar-mengajar dengan baik pula.

Kemudian 20 responden yang menjawab cukup, menyatakan melihat bahwa kuantitas guru cukup dalam meningkatkan mutu pendidikan. hal ini merupakan suatu tanggapan bagi responden bahwa kuantitas guru yang cukup dapat menyebabkan mutu

pendidikan yang sangat minim dan merosot. Kemudian 5 responden yang menjawab kurang menyatakan hal itu dikarenakan memang responden tidak melihat adanya kuantitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini merupakan sangat minim kuantitas guru apabila dibandingkan dengan jumlah siswa yang melebihi jumlah yang sewajarnya, sehingga mutu pendidikan tidak mengalami kemajuan dan sangat buruk.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuantitas guru sudah baik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini merupakan suatu gambaran yang menunjukkan bahwa pendidikan di kecamatan deli tua sudah mengalami suatu kemajuan, sehingga tidak mengalami kemerosotan yang sangat menekan kehidupan masyarakat. Dan mutu pendidikan harus lebih diutamakan untuk dapat memperbaharui pendidikan yang ke arah yang lebih baik. Kemudian kuantitas guru dapat lebih ditingkatkan lagi agar terjadi keseimbangan antara kuantitas guru dengan mutu pendidikan, sehingga kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, baik pemerintah maupun pihak sekolah harus memperhatikan hal tersebut supaya dalam pendidikan terdapat suatu nilai yang positif bagi masyarakat

Tabel XV Tanggapan responden tentang program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 54 | 94,76 % | N = 57 |
| Kurang | 3 | 5,26 % | |
| Tidak | - | - | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas, mengenai program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dapat dilihat bahwa 57 responden yang diteliti, 54 orang (94,76%) yang menjawab ya, dan 3 orang (5,26%) yang menjawab kurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 54 responden

menyatakan ya karena responden mengetahui bahwa program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut sudah terealisasi ke pihak sekolah kemudian pihak sekolah yang memberikan kepada anak didik terutama bagi mereka yang kurang mampu dan bahkan bagi mereka yang tidak mampu. Dan responden juga melihat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut langsung diterima oleh mereka yang wajib menerima. Kemudian dana tersebut diterima setiap 3 bulan sekali.

Kemudian 3 responden menyatakan kurang, karena responden kurang mengetahui adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan kepada orang yang kurang mampu maupun yang tidak mampu. Dan responden juga tidak memahami arti dan manfaat dana tersebut yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Namun masyarakat hanya mengetahui bahwa ada subsidi dari pemerintah yaitu dana BOS (bantuan operasional sekolah).

Tabel XVI Tanggapan responden tentang program dana BOS Bantuan Operasional Sekolah

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 57 | 100 % | N = 57 |
| Kurang | - | - | |
| Tidak | - | - | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dapat dilihat bahwa 57 responden yang diteliti, seluruhnya 57 (100%) menjawab ya. Hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 57 responden seluruhnya menjawab ya karena responden melihat bahwa program yang dibuat pemerintah tersebut yaitu terealisasinya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi siswa yang kurang mampu. Dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) ini sangat penting karena dapat membantu meringankan biaya sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu, sehingga tidak ada lagi alasan

bahwa tidak ada biaya untuk menyekolahkan anaknya.

Kemudian pemerintah juga memberikan dana BOS ini bukan hanya di sekolah-sekolah negeri melainkan juga diberikan kepada pihak swasta, dimana hal ini merupakan suatu tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terealisasinya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi mereka yang kurang mampu membiayai sekolah sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat merasakan dunia pendidikan karena hal ini yang penting bagi mereka untuk masa depan.

Tabel XVII. Tanggapan responden tentang Pemerintah Camat Mengawasi Pemberian Dana BOS dengan ketat

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 39 | 68,42 % | N = 57 |
| Kurang | 13 | 22,81 % | |
| Tidak | 5 | 8,77 % | |
| Jmlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel diatas mengenai Pemerintah Camat mengawasi pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan ketat dapat dilihat bahwa 57 responden yang diteliti, 39 orang (68,42%) yang menjawab ya, 13 orang (22,81%) yang menjawab kurang, dan 5 orang (8,77%) yang menjawab tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 39 responden menyatakan ya karena responden melihat bahwa pemerintah kecamatan mengawasi pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah supaya dana tersebut langsung dapat dipergunakan oleh mereka yang kurang mampu atau yang tidak mampu. Dana dana BOS ini diberikan dengan tujuan membantu ekonomi masyarakat lemah, sehingga dapat melanjutkan kehidupan dan dapat membiayai sekolah-sekolah

anak-anaknya sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Kemudian 13 responden menyatakan kurang, karena responden lebih beranggapan bahwa banyak anak didik yang tidak menerimanya, karena kurang diawasi oleh pemerintah sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap dana tersebut. Sedangkan 5 responden menyatakan tidak, karena memang tidak mengetahui adanya pemerintah kecamatan mengawasi dana tersebut dengan ketat. Hal ini merupakan suatu anggapan bahwa pemerintah tidak dapat mengawasi pemberian dana tersebut dengan ketat, sehingga masyarakat berasumsi bahwa pemerintah belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pemerintah sudah memberikan subsidi kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut langsung diberikan kepada mereka yang berhak (orang yang kurang mampu maupun yang tidak mampu). Oleh karena itu, pemerintah telah mengawasi dengan ketat penyaluran dana tersebut.

Tabel XVIII. Tanggapan Responden tentang program pendidikan di Kecamatan Deli Tua sudah terlaksana atau diawasi dengan baik

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 27 | 47,37 5 | N = 57 |
| Cukup | 24 | 42,11 5 | |
| Kurang | 6 | 10,52 % | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai program pendidikan di kecamatan deli tua sudah terlaksana atau diawasi dengan baik dapat dilihat bahwa 57 responden yang diteliti, 27orang (47,37%) yang menjawab ya, 24 orang (42,11%) yang menjawab cukup, dan 6 orang (10,52%) yang menjawab kurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 27 responden menyatakan ya responden memang melihat program pendidikan sudah terlaksana atau diawasi dengan ketat. Hal ini terlihat dengan adanya suatu hasil yang diberikan oleh pemerintah dan pihak sekolah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kualitas dan kuantitas guru yang seimbang.

Kemudian 24 responden menyatakan cukup, karena responden melihat bahwa program pendidikan sudah terlaksana atau diawasi dengan baik, sehingga masyarakat masih ada beranggapan bahwa pemerintah belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian 6 responden tersebut menyatakan kurang, karena responden tidak melihat bahwa program pendidikan sudah terlaksana atau diawasi dengan baik dan masyarakat juga tidak mengetahui apa saja program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah.

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah itu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat mendukung kemajuan pendidikan, sehingga masyarakat tidak merasa tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat serta pihak sekolah harus mengadakan rapat untuk membahas tentang perkembangan pendidikan dan kemajuan kehidupan masyarakatnya.

Tabel XIX. Tanggapan responden tentang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan instruksi dari dinas pendidikan

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | - | - | N = 30 |
| Kurang | - | - | |
| Tidak | 30 | 100 % | |
| Jumlah | 30 | 100 % | |

Berdasarkan tabel di atas mengenai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan instruksi dari dinas pendidikan dapat dilihat bahwa 57 responden yang diteliti,

49 orang (85,97%) yang menjawab ya, 7 orang (12,28%) yang menjawab kurang, dan 10 orang (1,75%) yang menjawab tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 27 responden menyatakan ya responden memang melihat bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan instruksi dari dinas pendidikan.

Kemudian 7 responden menyatakan kurang, karena responden tidak melihat bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu berdasarkan instruksi dari dinas pendidikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemudian 1 responden tersebut menyatakan tidak, karena responden tidak mengetahui tentang program-program apa saja yang dilaksanakan pemerintah kecamatan berdasarkan instruksi dari dinas pendidikan. Hal ini terjadi karena ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pemerintah dan dinas pendidikan harus saling bekerja sama dalam menangani masalah pendidikan dan untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat juga harus mengetahui apa-apa saja program pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat itu dapat maju, tidak tertindas dan memiliki pendidikan minimal pendidikan dasar.

Oleh karena itu, pemerintah dan dinas pendidikan telah berhasil untuk menciptakan keluarga harmonis, dinamis, dan tentunya mempunyai keinginan yang kuat untuk maju dan berkembang

Tabel XX. Tanggapan Responden tentang cara kerja pemerintah kecamatan perlu ditingkatkan khususnya dalam bidang pendidikan

| Alternatif Jawaban | Frekuensi (F) | Persentase (100%) | Keterangan |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Ya | 57 | 100 % | N = 57 |

Margaretta D. Sitanggang dan Suadi Husin, Persepsi Masyarakat terhadap

| | | | |
|-------------------------|----|-------|--|
| Tidak perlu | - | - | |
| Tidak perlu sama sekali | - | - | |
| Jumlah | 57 | 100 % | |

Berdasarkan tabel diatas mengenai cara kerja pemerintah kecamatan perlu ditingkatkan khususnya pada bidang pendidikan dapat dilihat bahwa 57 responden yang diteliti seluruhnya menjawab ya (100%).

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan yaitu 57 responden seluruhnya menyatakan ya responden melihat atau memang peduli terhadap cara kerja pemerintah kecamatan khususnya pada bidang pendidikan. Dan responden yang mengetahui dengan jelas cara kerja pemerintah kecamatan dalam bidang pendidikan yaitu adanya program-program yang dibuat oleh pemerintah kecamatan untuk dapat meningkatkan pendidikan, sehingga dengan peningkatan pendidikan tersebut masyarakat tidak ada lagi yang buta huruf atau yang disebut dengan orang yang tidak memiliki pendidikan minimal pendidikan dasar.

Jadi, dengan demikian cara kerja dari pemerintah kecamatan harus lebih ditingkatkan lagi untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dan mensukseskan program-program dari pemerintah kecamatan.

Kemudian pemerintah kecamatan juga harus lebih mengawasi dan

mengevaluasi program-program yang dibuatnya, sehingga masyarakat lebih percaya, yakin terhadap program-program tersebut dan tidak ada lagi anggapan bahwa pemerintah kecamatan tidak memperhatikan kehidupan masyarakatnya termasuk di bidang pendidikan.

Tabel XXI. Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Angket Responden

| Nomor Item Angket | Option Angket Responden | | | Jumlah |
|-------------------|-------------------------|----|----|--------|
| | A | B | C | |
| 1 | 38 | 17 | 2 | 57 |
| 2 | 32 | 23 | 2 | 57 |
| 3 | 40 | 16 | 1 | 57 |
| 4 | 35 | 20 | 2 | 57 |
| 5 | 31 | 19 | 7 | 57 |
| 6 | 30 | 24 | 3 | 57 |
| 7 | 45 | 11 | 1 | 57 |
| 8 | 31 | 25 | 1 | 57 |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 57 |
| 10 | 14 | 19 | 24 | 57 |
| 11 | 18 | 20 | 19 | 57 |
| 12 | 12 | 27 | 18 | 57 |
| 13 | 25 | 17 | 15 | 57 |
| 14 | 32 | 20 | 5 | 57 |
| 15 | 54 | 3 | - | 57 |
| 16 | 57 | - | - | 57 |
| 17 | 39 | 13 | 5 | 57 |
| 18 | 27 | 24 | 6 | 57 |
| 19 | 49 | 7 | 1 | 57 |
| 20 | 57 | - | - | 57 |

Tabel XXII. Rekapitulasi Hasil Persentase Jawaban Responden

| Nomor Item Angket | Nomor Tabel | Option Angket Responden (%) | | | | | | Total |
|-------------------|-------------|-----------------------------|------|-------|--------|------|-------|-------|
| | | A | Ket | B | Ket | C | Ket | |
| 1 | I | 66,67 | Baik | 29,83 | Buruk | 3,51 | Buruk | 100% |
| 2 | II | 56,14 | Baik | 40,35 | Sedang | 3,51 | Buruk | 100% |
| 3 | III | 70,18 | Baik | 28,07 | Sedang | 1,75 | Buruk | 100% |
| 4 | IV | 61,40 | Baik | 35,09 | Sedang | 3,51 | Buruk | 100% |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|-------|--------|-------|--------|------|
| 5 | V | 54,39 | Baik | 33,33 | Sedang | 12,28 | Buruk | 100% |
| 6 | VI | 52,63 | Baik | 42,11 | Sedang | 5,26 | Buruk | 100% |
| 7 | VII | 78,95 | Sangat Baik | 19,30 | Buruk | 1,75 | Buruk | 100% |
| 8 | VIII | 54,39 | Baik | 43,86 | Sedang | 1,75 | Buruk | 100% |
| 9 | IX | 59,65 | Baik | 31,58 | Sedang | 8,77 | Buruk | 100% |
| 10 | X | 24,56 | Buruk | 33,33 | Sedang | 42,11 | Sedang | 100% |
| 11 | XI | 31,58 | Sedang | 35,09 | Sedang | 33,33 | Sedang | 100% |
| 12 | XII | 21,05 | Buruk | 47,37 | Sedang | 31,58 | Sedang | 100% |
| 13 | XIII | 43,86 | Sedang | 29,82 | Sedang | 26,32 | Sedang | 100% |
| 14 | XIV | 56,14 | Baik | 35,09 | Sedang | 8,77 | Buruk | 100% |
| 15 | XV | 94,76 | Sangat Baik | 5,26 | Buruk | - | - | 100% |
| 16 | XVI | 100 | Sangat baik | - | - | - | - | 100% |
| 17 | XVII | 68,42 | Baik | 22,81 | Buruk | 8,77 | Buruk | 100% |
| 18 | XVIII | 47,37 | Sedang | 42,11 | Sedang | 10,52 | Buruk | 100% |
| 19 | XIX | 85,97 | Sangat baik | 12,28 | Buruk | 1,75 | Buruk | 100% |
| 20 | XX | 100 | Sangat baik | - | - | - | - | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui persentase jawaban responden, masyarakat memberikan pandangan yang positif atau cukup baik terhadap Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Lingkungan V Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Tabel XXIII. Keterangan Rekapitulasi Hasil Persentase Jawaban Responden (Data) dari Tabel -Tabel Tabulasi

| Kuantitatif | Kualitatif |
|-------------|-------------|
| 76 - 100 | Sangat Baik |
| 56 - 75 | Cukup Baik |
| 26 - 55 | Kurang |
| 0 - 25 | Buruk |

Sebelumnya telah diketahui hasil penelitian dan dibuat ke dalam tabel-tabel beserta penjelasannya. Maka berikutnya adalah pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan (Studi Kasus Di Lingkungan V Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang) yang penjelasannya adalah sebagai berikut: Pendidikan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang harmonis. Dengan pendidikan setiap orang dapat membaca dan menulis sehingga tidak ada lagi yang merasa dirinya itu bodoh. Oleh karena itu,

setiap orang berhak untuk mengancam pendidikan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ke arah yang lebih baik. Namun dalam hal ini, masih banyak diketahui bahwa masyarakat belum semuanya yang dapat bersekolah atau mengancam pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu bahkan yang tidak mampu sekalipun. Jadi, masih ada ditemukan anak-anak usia sekolah yang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah.

Oleh karena itu, memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah kecamatan untuk dapat membantu meringankan penderitaan rakyat. Dalam hal ini pemerintah kecamatan mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap masyarakatnya. Pemerintah kecamatan juga mempunyai tugas yang sangat berat, tugas pemerintah camat bukan hanya mengurus bidang sosial budaya saja namun pemerintah kecamatan juga harus mengurus bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan membuat suatu kebijakan bahwa adanya bantuan bagi mereka yang kurang mampu atau yang tidak mampu. Dengan adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kepada yang membutuhkannya. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang sangat baik dari

pemerintah untuk dapat membantu segala biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu atau yang tidak mampu.

Tugas pemerintah kecamatan ini tentunya ada kerja sama dan intruksi dari dinas pendidikan, pemerintah dan pihak sekolah. Dengan adanya kerja sama tersebut, akan menghasilkan suatu yang baik pula yaitu setiap orang dapat merasakan duduk di bangku sekolah sehingga mereka merasa hidup layak.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan kemudian diserahkan kepada daerah, maka pemerintah kecamatan telah memberikan perhatian khusus terhadap mutu pendidikan. Dana tersebut juga dapat meringankan biaya sekolah, sehingga anak-anak di usia sekolah dapat bersekolah dan bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Selain dana tersebut, hal yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, memberikan masukan-masukan serta arahan kepada pihak sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah kecamatan juga mengawasi jalannya penyelenggaraan dalam bidang pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap baik buruknya penyelenggaraan dari pihak sekolah. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan ialah kuantitas guru/ tenaga pendidik dan sarana dan prasarana pendidikan.

Kuantitas guru dalam bidang pendidikan sudah baik, hal ini terbukti dengan tersedianya guru-guru bidang studi dan ini merupakan suatu gambaran bahwa kuantitas guru sangat penting untuk dapat mendidik, mengajar anak didik dengan baik sehingga ada suatu anggapan dari masyarakat bahwa dengan sikap anak didik yang baik tercermin dari hasil didikan guru maupun pihak sekolah yang baik pula. Oleh karena itu, kuantitas guru harus diselaraskan dengan kualitas guru pula sehingga sekolah mendapatkan

prestasi yang baik dan di dukung dengan disiplin yang kuat dari sekolah itu sendiri. Jadi, kuantitas guru harus benar-benar diperhatikan demi kelancaran proses belajar-mengajar.

Adanya sarana dan prasarana pendidikan juga sangat mendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah kecamatan sudah cukup memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan sehingga memberikan suatu nilai yang positif terhadap pemerintah kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diprogramkannya. Selain itu, masyarakat juga dapat merasakan segala fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memperlancar aktivitas-aktivitas siswa dalam proses belajar-mengajar dan membantu masyarakat untuk mengurangi beban yang mereka rasakan sehingga tidak ada lagi alasan tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah kecamatan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sarana dan prasarana pendidikan tersebut memang dibiayai oleh pemerintah kecamatan, hal ini dilakukan untuk dapat menyukseskan pendidikan. Namun pemerintah harus lebih memberikan pelayanan dan perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu hal yang tidak boleh diabaikan, hal ini disebabkan karena sangat mendukung terhadap kelancaran dalam bidang pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud adalah segala perlengkapan yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar. Apabila sarana dan prasarana pendidikan telah terpenuhi, maka akan tercipta suatu ketentraman dalam proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, hal ini harus ditangani oleh pemerintah dan harus lebih ditingkatkan lagi.

Selain pemerintah, pihak sekolah, dalam hal ini masyarakat juga harus ikut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak mereka. Keikutsertaan masyarakat dalam

menyediakan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu cara orang tua untuk dapat membangkitkan semangat belajar bagi anak-anak mereka, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan mereka bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kemudian, masyarakat juga harus benar-benar memberikan tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya agar tidak mudah putus-asa dengan menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan saling bekerja sama dalam memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Adapun cara kerja atau kinerja pemerinah kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Namun pemerintah kecamatan tidak begitu saja mengabaikan tugasnya karena adanya anggapan atau respon dari masyarakat bahwa pemerintah kecamatan memiliki nilai yang positif dalam melaksanakan tugasnya. Tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan karena adanya intruksi dari pemerintah dan dinas pendidikan. Selain itu, pemerintah kecamatan juga harus bekerja sama dengan pihak sekolah dan masyarakat agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dimana setiap orang dapat merasakan hidup yang aman dan hidup yang layak sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

SIMPULAN

Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak di desa Gunug Tua kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailaing Natal adalah faktor rendahnya ekonomi yang di tunjukkan dengan persentase sebesar 54,5%, faktor rendahnya pendidikan orang tua dengan persentase sebesar 53,5%, faktor lingkungan sosial dengan persentase sebesar 36,5% dan faktor psikologis dengan persentase sebesar 28%. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan

oleh orang tua terbagi dua, yaitu internal dan eksternal, antara lain faktor dari diri anak itu sendiri, faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan banyaknya anak, keluarga yang tidak harmonis (broken home) dan lingkungan yang buruk serta latar belakang orang tua yang menjadi korban kekerasan pada waktu kecil. Dari beberapa faktor di atas faktor yang besar pengaruhnya terhadap tindak kekerasan terhadap anak adalah faktor ekonomi. Dampak atau efek yang timbul pada anak korban tindak kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif dan emosi yang labil. Kasus tindak kekerasan orang tua terhadap anak sulit terungkap hal ini disebabkan oleh penolakan dari si korban sendiri karena rasa takut dan malu, keluarga yang didalamnya yang terjadi tindak kekerasan sering tidak melaporkan karena menganggap hal tersebut adalah masalah internal keluarga dan merupakan aib. Adapun upaya yang dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga antara lain dengan memecahkan dan mendiskusikan setiap permasalahan yang timbul di dalam keluarga, memberikan contoh yang baik kepada anak dan bersikap tenang dalam menghadapi kenakalan anak. Upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui media massa maupun media elektronik dan memiliki pengetahuan agama yang memadai dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dengan diberlakukannya undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua lebih memahami cara melakukan pola asuh anak dan hak-hak anak maupun kewajiban sebagai orang tua yang baik dapat menjamin penghapusan tindak kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, J. S. 2000. *Pendidikan Berbasis Mutu*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. 2000. *Satistik*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Husni, S. 2004. *Diktat Ilmu Kewarganegaraan*. Medan: UNIMED
- Ilyas, Y. 1999. *Kinerja : Teori, Penilaian dan penelitian*. Jakarta: FKM UI.
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Media.
- Kartono, K. 1996. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Mandar Maju
-1997. *Tinjauan Holistik mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Prasnya Paramita
-2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mujiburrahman, (2011), Hubungan Antara Pendidikan, Motivasi Dan Budaya Kerja Dengan Kinerja Pegawai (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):160-169
- Nawawi, H. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Purba, I.A., dan Ponirin, (2013). Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 112-122.
- Rahmadani, A., Irwan N., dan Husni T.N., (2013), Pengaruh Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sebagai Upaya Peningkatan Kerja Pada Polda Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1 (1): 1-5
- Siagian, S.P. 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, M. dkk. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, N.S.S., (2013), Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 11-27.
- Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 192-203
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan perubahannya. Medan: Penabur.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 *Tentang guru dan Dosen*
- Undang-Undang No. 20. Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang No. 32. Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*.